

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA MASSAMATURU KEC. POLONGBANGKENG UTARA KAB. TAKALAR)

Zainuddin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Muhammad Guntur

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar
Email: Guntur357unm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar). Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dapat dilihat dari enam indikator evaluasi kebijakan yaitu: 1) Efektifitas hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan target pembangunan desa tidak tercapai, 2) Efisiensi hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan dana desa tidak mencukupi kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat 3) Kecukupan hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan kegiatan pembangunan fisik tidak mampu dicukupi dari dana desa, 4) Perataan hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan dana desa belum semua lapisan masyarakat yang menikmati manfaat dari kegiatan dana desa, 5) Responsivitas hasil yang diperoleh baik disebabkan dana desa tidak dinikmati kelompok tertentu di desa seperti perangkat desa, Bapendes dari kabupaten dan 6) Ketepatan hasil yang diperoleh baik disebabkan dana desa memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan ketersediaan fasilitas di desa yang mengalami banyak kemajuan dan perubahan. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah desa harus meningkatkan anggaran dana desa dalam kegiatan pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat agar keberadaan dana desa bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Evaluasi, Dana Desa, Pembangunan Desa*

1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang berlaku di Indonesia telah membawa perubahan yang cukup signifikan. Dalam era otonomi ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu: Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa merupakan wilayah penduduk yang mayoritasnya masih bekerja sebagai petani dan hubungan sosial antar masyarakat cukup erat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Desa yang telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta

pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa yang telah dianggarkan dan diterima oleh desa diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan desa di Indonesia dan mampu mengelola potensi yang dimilikinya dan menunjang fasilitas umum guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunannya.

Permasalahan dana desa di Indonesia kerap muncul mulai dari sumber daya manusia belum siap, pencairan dana dari pusat ke daerah atau daerah ke desa mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, kurangnya pengawasan terhadap uang desa, transparansi yang kurang, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dan yang paling fatal adalah korupsi dana desa.

Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya harus segera diatasi agar ditahun anggaran berikutnya tidak ada lagi masalah yang menjadi temuan oleh pemerintah pusat maupun daerah terhadap dana desa. Pentingnya koordinasi diberbagai lini agar dana desa yang sudah cair dapat berjalan secara optimal dan para perangkat desa mengajak masyarakat untuk ikut serta terhadap pembangunan di desa. Perlunya integritas dari Kepala Desa dan unsur desa untuk kemajuan desa, dana desa akan terserap dan

pembangunan merata apabila oknum desa mempunyai integritas baik, jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 2017 mendapat Dana Desa Rp.62,964,264,000 milyar dan pada tahun 2018 mendapat tambahan dana sebesar Rp.69,833,666,000 milyar dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp.80,246,588,000 milyar yang diperuntukkan untuk 76 desa di Kabupaten Takalar.

Pada penelitian ini hanya berfokus pada Desa Massamaturu yang menerima Dana Desa Rp.711,049,000 juta pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp.784,042,000 juta dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak Rp.915,248,000 juta yang berarti dana desa tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya adalah mengurus dan mengelola keuangan desa. sesuai Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa, namun dikhawatirkan justru akan menjadi

lahan perangkat desa melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun permasalahan yang ditemukan dari penyelewengan penggunaan dana desa seperti yang terjadi pada Desa Bontoloe yang menyebabkan Kepala Desa Bontoloe bersama dengan Anaknya harus mendekam di Lapas Kelas II B Takalar, Kepala Desa tersebut telah melakukan korupsi dana desa sebesar Rp. 98.700.000 juta. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Atas Perbuatan tersebut, kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal dua puluh tahun. (Kamaruddin, 2017) Tribun-Timur.com.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan dari penggunaan dana desa di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar adalah kurangnya kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam membantu pelaksanaan pemerintahan desa, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, pencairan dana desa ke desa sering mengalami keterlambatan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, 07/10/2019).

Penelitian tentang Dana Desa yang telah dilakukan oleh Gustiawati, (2019) dengan judul Analisis Kebijakan Dana Desa (Studi Kasus

Pada Desa Barugae dan Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Kebijakan Dana Desa melihat dampak yang dirasakan masyarakat Desa Barugae dan Desa Bonto Bulaeng sudah baik maksudnya kebijakan dana desa sudah dapat dirasakan manfaatnya baik itu dari program pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

Penelitian selanjutnya pada skripsi Hafid (2017) dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep” bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrembang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa Mangilu cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Penggunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Desa (Studi di Desa Masssamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk Mengevaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Masssamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar).

4. Tinjauan Pustaka

1) Konsep Kebijakan Publik

Carl J Federick dalam Agustino (2006, hal. 7) mendefinisikan “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Robert Eyestone dalam Agustino (2006, hal. 6), mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Thomas R. Dye dalam Winarno (2016, hal. 19), “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Anderson dalam Agustino (2006, hal. 7–8), mengemukakan kebijakan publik merupakan

serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

2) Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Nawawi (2009, hal. 155), menyatakan bahwa “evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya”.

Jones dalam Nawawi (2009, hal. 155–156), mengemukakan “evaluasi suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintah yang bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metoda analisis, bentuk analisis, dengan uraian berikut ini:

1. Spesifikasi, merupakan sub kegiatan terpenting. Ia mengacu pada identifikasi tujuan serta tujuan yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau program.
2. Pengukuran (*measurement*), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan evaluasi.
3. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan.
4. Rekomendasi adalah suatu penentuan atau penemuan mengenai apa yang akan dilanjutkan selanjutnya.

Jones dalam Soenarko (2005, hal. 214), *“Evaluasi is an activity to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the technique of measurement, and the methods of analysis”*. (Evaluasi adalah kegiatan yang dipersiapkan dan ditunjukkan untuk menilai mutu dan keberhasilan program pemerintah yang terutama sekali terdiri dari kegiatan-kegiatan, pemilihan-pemilihan objek, cara pengukuran dan metode analisa).

Dye (2002, hal. 312) dalam Mulyadi (2018, hal. 100), mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai suatu pengukuran terhadap keseluruhan efektivitas program nasional dalam mencapai sasarannya, atau pengukuran terhadap efektivitas kriteria dari dua atau lebih program dalam mencapai tujuannya secara umum.

Anderson dalam Hariyanto (2017, hal. 50), *“evaluasi kebijakan yaitu suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak”*.

Makmur & Thahier (2016, hal. 40), evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terencana, rasional, dan kejujuran dengan menggunakan pengetahuan kemudian dipadukan kemahiran kerja fisik manusia untuk menilai secara obyektif mulai dari tindakan formulasi atau perumusan sampai kepada tingkat implementasi atau penerapan salah satu jenis kebijakan publik.

3) Konsep Dana Desa

Nurcholis (2011, hal. 2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Koentjaraningrat (1984) dalam Muhammad & Alkhudri (2016, hal. 3), *“Desa dimaknai sebagai suatu komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”*.

Widjaja (2012, hal. 3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

4) Konsep Pembangunan Desa

Menurut Riyadi dan Deddy (2005) dalam Badrudin (2015), istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang

lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Tadaro dan Smith (2003) dalam Arsyad et al., (2011, hal. 13), pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi, yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan.

Siagian (2017, hal. 4), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara langsung dapat mendukung program pemerintah (Nawacita).

Pembangunan desa terdapat dalam Nawacita ketiga yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Menurut Khoirah & Meylina (2018) dalam Mulyadi (2019, hal. 69–70), pembangunan desa merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mengenai bantuan keuangan desa yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan desa. Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada triologi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

5. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mendalam mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian ini akan menggunakan data berupa kata-kata tertulis, uraian, yang diperoleh dari informan dan perilaku subjek yang diamati.

6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dipaparkan dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni, Bagaimana Penggunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan Desa (Studi di Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar).

Dari data-data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun variabel penelitian yang akan dibahas, yaitu Evaluasi Kebijakan dari William N Dunn dalam Hariyanto yang terdiri dari enam indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai pengumpulan alat, pengumpulan data, dengan penentuan beberapa informan yang dianggap mempunyai kapabilitas dan mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Massamaturu, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Ketua dan Anggota Pelaksana Pembangunan Fisik Desa, dan Masyarakat Desa. Ada enam indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan rekapitulasi keenam indikator evaluasi kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng

Utara Kab. Takalar ada empat indikator yang dikatakan kurang baik seperti: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Pemerataan. Sementara ada dua indikator yang dikatakan baik yaitu: Responsivitas dan Ketepatan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Efektifitas

Hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan target pembangunan desa tidak mampu dicukupi oleh dana desa. Karena pembangunan di desa masih banyak yang belum memadai sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Efisiensi

Hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan anggaran dana desa yang disediakan tidak mencukupi kegiatan pembangunan fisik desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus membutuhkan anggaran atau sumber dana lainnya seperti APBD Kabupaten atau Provinsi agar pembangunan bisa berjalan dengan baik.

3. Kecukupan

Hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan desa tidak mampu dicukupi dari dana desa saja, harus membutuhkan atau didukung oleh sumber dana seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR).

4. Pemerataan

Hasil yang diperoleh kurang baik disebabkan dana desa yang selama ini bergulir baru sebagian atau belum semua lapisan masyarakat desa yang menikmati manfaat dari kegiatan dana desa.

5. Responsivitas

Hasil yang diperoleh baik disebabkan dana desa yang selama ini bergulir tidak dinikmati kelompok tertentu di desa seperti (perangkat desa), Bapendes (dari kabupaten) dan dana desa sangat membantu bagi pelaksana usaha warga/rumah tangga di desa dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

6. Ketepatan

Hasil yang diperoleh baik disebabkan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahun memberikan dampak yang sangat baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, perekonomian desa dan ketersediaan fasilitas di desa yang mengalami banyak kemajuan dan perubahan.

7. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan maka dapat disimpulkan bahwa ada empat indikator yang dikatakan kurang baik seperti: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Perataan. Sementara ada dua indikator yang dikatakan baik yaitu: Responsivitas dan Ketepatan.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Massamaturu Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dapat meningkatkan penggunaan anggaran dana desa dalam

pembangunan desa agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan adanya dana desa dalam pembangunan desa.

C. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran yaitu diharapkan kepada pemerintah desa harus meningkatkan anggaran dana desa dalam kegiatan pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat. Agar keempat indikator yang dikatakan kurang baik yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Perataan bisa berjalan dengan baik sesuai peruntukan dana desa sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan keberadaan dana desa bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat

8. Daftar Pustaka

1) Sumber Buku

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arsyad, L., Satriawan, E., Mulyo, J. H., & Fitriady, A. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal* (1 ed.). UPP STIM YKPN.
- Hariyanto, E. (2017). *Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN*. Gava Media.
- Makmur, & Thahier, R. (2016). *Konseptual & Kontekstual Administrasi Dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. PT Refika Aditama.
- Muhammad, & Alkhudri, A. T. (2016). *Sosiologi Pedesaan Teoritisasi Dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia* (1 ed.). Rajawali Pers.

- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek* (1 ed.). Putra Media Nusantara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Siagian, S. P. (2017). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, Dan Strateginya* (2 ed.). PT Bumi Aksara.
- Soenarko. (2005). *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press.
- Widjaja, H. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Komparatif*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

2) Sumber Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Sumber Skripsi dan Jurnal

- Gustiawati, A. (2019). *Kebijakan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Barugae Dan Desa Bonnto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba*. Universitas Negeri Makassar.
- Hafid, R. (2017). *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*. Hasanuddin Makassar.
- Mulyadi, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung*. *Journal Ilmu Administrasi*, XXX(1), 66–80.

4) Internet

- Badrudin, S. (2015). *Pengertian Pembangunan*. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/teori-dan-indikator-pembangunan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. <http://www.djpk.kemkeu.go.id>
- Kamaruddin, R. (2017). *Korupsi Dana Desa, Kadesa Bontoloe Takalar Bersama Anakny Ditahan*. *Tribun Timur.com*. <https://makassar.Tribunnews.com/2017/12/16/korupsi-dana-desa-kades-bontoloe-takalar-bersama-anakny-ditahan>